

**PERAN PUSTAKAWAN DALAM MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS MASYARAKAT PELAKU UMKM DAN
PERCEPATAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL
DI ACEH**

**THE ROLE OF LIBRARIANS IN IMPROVING COMMUNITY
PRODUCTIVITY OF MSME ACTORS AND ACCELERATING
DIGITAL LIBRARY TRANSFORMATION IN ACEH**

Saiful Bahgia¹, Hasbi²

¹Prodi Akuntansi/Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

²Pusat Inkubasi Bisnis/Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi: ¹ saiful.bahgia@akuntanindonesia.or.id

ABSTRACT

The library as a vehicle for lifelong learning develops the potential of the community and educates the nation's life. In accelerating digital transformation to increase the productivity of UMKM actors in Aceh, the role of librarians is needed to be maximized in Aceh. This is because social media is the main source of the public in accessing the various information needed. As the main pioneer in the success of digital libraries, the role of librarians as information providers and services is needed to contribute to the progress of digital libraries in Aceh, especially for UMKM actors to take advantage of their gadget to access various kinds of references in digital libraries (*e-Library*) in developing its business. Librarians here are spearheads in providing digital literacy to the public, to minimize news and information that is hoax, misuse of social media and other cyber access during the pandemic and post-pandemic. The acceleration of Digital Library Transformation is expected to be able to stimulate Indonesia's economic growth, the creation of new jobs and the realization of the implementation of the Job Creation Law on the empowerment, guidance, and protection of UMKM in Indonesia.

Keywords : *Digital Library, UMKM Go Digital, e-Library, Community, Productivity*

ABSTRAK

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam percepatan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM di Aceh, dibutuhkan peran pustakawan secara maksimal di Aceh. Hal ini mengingat media sosial menjadi sumber utama masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Sebagai pelopor utama dalam mensukseskan perpustakaan digital, peran pustakawan sebagai penyedia dan pelayanan informasi sangat dibutuhkan kontribusinya terhadap kemajuan perpustakaan digital di Aceh terutama bagi pelaku UMKM agar memanfaatkan gadget nya untuk mengakses berbagai macam referensi pada perpustakaan digital (*e-Library*) dalam mengembangkan bisnisnya. Pustakawan disini menjadi ujung tombak dalam memberikan literasi secara digital kepada masyarakat, untuk meminimalisir berita dan informasi yang bersifat hoax, penyalahgunaan media sosial dan akses dunia maya lainnya pada masa pandemi dan pasca pandemi. Percepatan Transformasi Perpustakaan Digital diharapkan mampu merangsang pertumbuhan perekonomian Indonesia, terciptanya lapangan pekerjaan baru dan terwujudnya implementasi undang-undang Cipta Kerja terhadap pemberdayaan, pembinaan, dan perlindungan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci : Perpustakaan Digital, UMKM Go Digital, e-Leberary, Masyarakat, Produktif.

1. PENDAHULUAN

Era digitalisasi saat ini sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap umat manusia di Indonesia, terlebih para penggiat media sosial dan media online lainnya, dalam rangka mempercepat transformasi digital Indonesia, segala bentuk transformasi digital baik bersifat informatif, edukatif, penelitian maupun lainnya, sudah melekat pada setiap masyarakat, kelompok orang, atau lembaga, yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pada penjelasan umum, dijelaskan bahwa keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tandatanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Berdasarkan penjelasan umum Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan ini terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan teknologi yang ada. Perpustakaan di Indonesia terus berkembang seiring berkembangnya teknologi, sejak daswarsa 1980an awal, teknologi informasi dan komunikasi mulai digunakan di Perpustakaan Indonesia. Perkembangan teknologi dan digital di Indonesia semakin bertambah dan menyasar berbagai macam kalangan masyarakat Indonesia, hanya saja daerah-daerah tertentu yang terbatas dengan kekuatan signal atau jaringan internet. Dengan semakin majunya perkembangan digital ini, perpustakaan digital diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan sasaran langsung kepada pelaku UMKM yang banyak membutuhkan referensi-referensi dalam meningkatkan perkembangan bisnisnya dan keberlangsungan perekonomian Indonesia. Dalam rangka revitalisasi perpustakaan digital dan percepatan transformasi pengetahuan untuk masyarakat sejahtera, terutama masyarakat pelaku UMKM yang ada di Aceh, maka sangat penting dan perlu

adanya peran pustakawan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan transformasi perpustakaan digital di Aceh.

Perkembangan zaman yang kini terus maju membuat masyarakat lebih memilih membaca melalui Gadget daripada media cetak (Hardcopy). Budaya Literasi dalam membaca di Aceh sendiri kini juga masih perlu ditingkatkan oleh beberapa lembaga dan komunitas yang ada di Aceh. Saat ini, pasca konflik dan bencana tsunami, Aceh merupakan daerah tertinggal dalam hal budaya literasi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Melihat kondisi ini Gubernur Aceh melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), mengimplementasi salah satu visi dan misinya untuk Aceh yang lebih baik khususnya dalam hal budaya literasi ini, melalui program Aceh Caroeng (Aceh Pintar) terus meningkatkan minat baca masyarakat Aceh. Salah satu konsep yang menjadi sasaran dari program ini adalah Konsep Perpustakaan 4.0 yaitu membangun integrasi literasi berbasis E-Digital. Secara nasional Literasi Digital Indonesia tahun 2021 berada pada level sedang dengan Skor 3,49, sebagaimana data yang dipublish oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 19 Januari 2022. Indeks peringkat literasi digital di Aceh, yang di pelopori terutama oleh kaum milenial masuk peringkat 10 besar nasional. Berikut rincian 10 daerah dengan score literasi digital tertinggi tahun 2021.

Table 1. National Digital Literacy Status Ranking 2021

Province	Score	Rangking
D.I.Y	3,71	1
Kepulauan Riau	3,68	2
Kalimantan Timur	3,62	3
Sumatera Barat	3,61	4
Gorontalo	3,61	5
Papua Barat	3,61	6
Nusa Tenggara Timur	3,60	7
Kalimantan Barat	3,58	8
Aceh	3,57	9
Kalimantan Utara	3,57	10

Sumber: Kemenkominfo RI (2022)

Secara nasional, akses sinyal internet semakin terjangkau. Akan tetapi jaringan internet yang tidak stabil sehingga koneksi sering terputus masih menjadi kendala utama di beberapa daerah. Selain itu kebanyakan orang pada tahun 2021 merogoh kantong Rp 50.000 – Rp 100.000 per bulan untuk akses internet. Komunikasi lewat pesan singkat dan bersosial media menjadi aktivitas utama masyarakat Indonesia di dunia maya (Kemenkominfo, 2022).

Dalam percepatan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dibutuhkan peran pustakawan secara maksimal di Aceh. Hal ini mengingat media sosial menjadi sumber utama masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Sebagai pelopor utama dalam mensukseskan perpustakaan digital, peran pustakawan ini sebagai penyedia dan pelayanan informasi menjadi tolak ukur kemajuan perpustakaan digital di Aceh terutama pelaku UMKM agar memanfaatkan gadget nya untuk mengakses berbagai macam referensi pada perpustakaan digital (*e-Library*) dalam mengembangkan bisnisnya.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian Indonesia baik secara regional maupun nasional bahkan juga tingkat internasional. Dampak dari pandemi ini menjadi masalah besar bangsa saat ini, semenjak Indonesia terdampak pandemi Covid-19 pada awal 2020 lalu, banyak masyarakat produktif di Indonesia merasakan kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga banyak pengangguran yang menimbulkan masalah baru yaitu kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pandemi Covid-19 membuat banyak pihak terdampak, termasuk UMKM yang seharusnya menjadi pahlawan dan bantalan pertumbuhan perekonomian Indonesia mulai lumpuh dan pelaku UMKM mulai kehilangan pendapatan. Sejak itu berbagai aktifitas dilakukan terbatas secara fisik. Pada saat yang bersamaan pula kebanyakan pelaku UMKM bertransformasi ke aktifitas ekonomi secara digital, seperti *e-commerce*, *marketplace* dan lain sebagainya. Namun demikian banyak pelaku UMKM yang masih membutuhkan banyak referensi-referensi mengenai strategi pemasaran secara online, cara melakukan promosi dan info lainnya untuk meningkatkan penjualan saat pandemi dan pasca pandemi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan ini dikaitkan dengan literatur-literatur ilmiah yang menjadi sumber rujukan dan landasan teori dalam penulisan ini. Menurut Sugiyono (2013), teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kajian teori diperlukan untuk menjawab teoritis dari rumusan masalah yang diteliti. Wagiran (2015:287), menyebutkan fungsi teori adalah sebagai berikut: a) sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian dengan menampilkan kesenjangan; bagian-bagian yang lemah dan ketidaksesuaiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya; b) untuk mengumpulkan semua konstruk atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian; c) untuk menampilkan hubungan antara variabel yang diteliti.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kajian teori juga memiliki peran penting dalam penelitian ilmiah. Peran teori adalah untuk memperjelas dan fokus pada permasalahan penelitian, menyusun dan memperbaiki metodologi, memperluas

pengetahuan dan landasan teoritis, serta menghubungkan dengan pengetahuan yang terkait. Berikut peneliti uraikan beberapa landasan teori sebagai kajian pustaka yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini secara singkat dan lebih bersifat deskriptif.

2.1 Perpustakaan dan Pustakawan

Sebagaimana pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan ayat 8, dijelaskan bahwa, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan disini menjadi ujung tombak dalam memberikan literasi secara digital kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM, untuk meminimalisir berita dan informasi yang bersifat *hoax*, penyalahan penggunaan media sosial dan akses dunia maya lainnya pada masa pandemi.

Menurut (Silaen, 2021) perubahan layanan ini dapat mengurangi kontak baik pustakawan maupun materi perpustakaan yang berbentuk fisik dengan para pengguna, mengingat masa pandemi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan meminimalisir sentuhan fisik. Seiring berkembangnya teknologi, adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan dan aktivitas sosial, pustaka disini menjadi sepi dan kurangnya minat pengunjung, apalagi rendahnya minat membaca masyarakat Aceh yang menjadi kendala dan hambatan utama berjalannya operasional perpustakaan.

2.2 Produktivitas Masyarakat

Pelaku UMKM Dalam melakukan transformasi aktivitas ekonomi secara digital, masyarakat membutuhkan banyak referensi dan literasi sumber pustaka untuk meningkatkan produktivitas usahanya dalam bentuk digital. Pustaka digital ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat, seperti usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dijelaskan bahwa, UMKM dikelompokkan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan mulai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan modal usaha mulai dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan mulai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan modal usaha mulai dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I non migas tahun 2022 sebesar 2,40% dan pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I migas tahun 2022 sebesar 3,24%. Karakteristik Wilayah Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/ Kota, 267 Kecamatan, 6.674 Kelurahan/ Desa, 4.486.570 Jiwa penduduk yang tersebar di 57.956 km² Wilayah Aceh, dari jumlah tersebut terdapat 7.184 koperasi (460.580 orang/anggota) dan 73.580 pelaku UMKM yang masih membutuhkan layanan pendampingan dan peran pemerintah (<https://diskop.acehprov.go.id>).

Berdasarkan data diatas sangat dibutuhkan kehadiran literasi atau sumber-sumber referensi yang valid yang berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM di Aceh.

2.3 Transformasi Perpustakaan Digital

Menurut Zakariya (2021) dalam penelitian sebelumnya disebutkan Transformasi perpustakaan digital adalah utilisasi perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi yang ada telah mengubah layanan secara tradisional yang diberikan pada perpustakaan menjadi online. Sebagai contoh layanan bahan bacaan secara online, online learning, teaching online material, membantu pengguna untuk terhubung pada resource yang ada. Dalam arena informasi digital yang berkembang, literasi digital adalah kompetensi yang sangat dicari di kalangan pustakawan, sebagai layanan perpustakaan sekarang ditawarkan melalui berbagai media, termasuk sosial media, situs jaringan, ponsel, atau bahkan kata-kata virtual.

Dalam pengertian lain, Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Darmono,2:2001). Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa transformasi perpustakaan digital adalah perubahan layanan perpustakaan yang dilakukan oleh pustakawan kepada pemustaka dari konsep konvensional kepada konsep digital, yang terdiri dari berbagai bentuk layanan melalui berbagai media, termasuk sosial media, situs jaringan, ponsel, atau bahkan kata-kata virtual.

3. METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisa dilakukan dari informasi yang diperoleh dengan melihat teori-teori yang relevan dengan kajian ilmu yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu data dikumpulkan dan dianalisis

dengan masalah yang ada. Penelitian deskriptif menurut Nasir (2012), adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, aktual, pada saat ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan peristiwa yang ada serta 5 kejadian yang menjadi fokus penelitiannya untuk dijabarkan secara rinci. (Rukajat, 2018). Sebagai pembandingan dalam penelitian ini dilakukan survey kebeberapa pelaku UMKM yang ada di Banda Aceh untuk melihat perkembangan seandainya para pustakawan ikut mendampingi memberi solusi untuk berbagai permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM teruta sekali dalam mendapatkan berbagai referensi mengenai promosi, pemasaran dan penjualan.

Selain pelaku UMKM peneliti juga mewawancarai mahasiswa dan akademisi, terkait peran pustakawan dalam memajukan perekonomian Indonesia, dalam hal ini khusus bidang literasi digital, selain meningkatkan kebermanfaatan gadget maupun media sosial yang dimiliki hampir semua orang di Aceh, dapat menumbuhkan daya baca masyarakat dengan efisiensi waktu, bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei dan analisa penulis terdapat beberapa peran pustakawan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pelaku umkm dan percepatan transformasi perpustakaan digital di Aceh, yaitu sebagai berikut.

4.1 Peran Pustakawan Sebagai Penggerak Literasi Digital di Aceh

Pustakawan bagian pemrosesan bahan pustaka juga harus mampu merubah peran mereka dari yang semula hanya memproses buku, sekarang mereka harus belajar tentang bagaimana cara memproses koleksi CD-ROM, koleksi Audivisual dan virtual, *e-learning*, dan sebagainya. Karena layanan informasi berbasis teknologi telah banyak diimplementasikan oleh perpustakaan, maka pustakawan mempunyai peran baru. Perubahan itu sedang berlangsung, khususnya bagi perpustakaan yang telah mengimplementasikan perpustakaan digital.

Kemajuan tehnologi telah mendorong para pustakawan harus meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi agar mereka dapat memenuhi tuntutan pengguna dan peran pustakawan akan semakin maksimal di Aceh, seperti misalnya menggiatkan gerakan minat baca masyarakat ke hal-hal yang lebih produktif, menciptakan trik dan tips untuk menarik minat masyarakat dalam memanfaatkan gadgetnya untuk mengakses berbagai literasi yang dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman tetntang pentingnya transformasi digital dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Aceh dan Indonesia, dan memberikan stimulus yang terkonsep dalam program pemerintah untuk mendukung UMKM Go Digital di Aceh.



Gambar 2.1 Tampak perpustakaan digital (kiri) dan perpustakaan konvensional (kanan)
Sumber: Humas Kota Banda Aceh (2021)

4.2 Adanya Panduan Layanan Virtual Khusus Bagi UMKM

Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM terhadap pasar. Masyarakat Aceh saat ini sudah menggunakan berbagai pemasaran dalam bentuk digital, namun masih kerap ditemukannya permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan masyarakat karena kurangnya edukasi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana digital untuk aktifitas sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Maka disini perlu peran pustakawan yang handal untuk mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi terwujudnya Ekonomi Digital di Aceh.

4.3 Layanan Referensi

Layanan referensi Perpustakaan Digital merupakan salah satu layanan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mencari suatu referensi saat pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya layanan referensi dilakukan dengan konsep virtual atau digital dibutuhkan kesiapan daripada Pustakawan yang handal dalam dunia IT. Untuk dapat mengakses layanan ini maka Pustakawan dan Perpustakaan Digital di Aceh harus memberikan kemudahan bagi pemustaka dalam mencari berbagai referensi, terutama harus bisa menjadi agen penggerak minat dan semangat membaca masyarakat Aceh yang akhir-akhir ini terkikis hilang begitu saja akibat penyalahgunaan media sosial, sarana dan prasarana digital kepada hal-hal yang kurang produktif, misalnya seperti main game, penggunaan medsos yang tidak wajar dan berlebihan.

4.4 Media Promosi

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pelaku UMKM, Perpustakaan digital di Aceh juga harus menjadi media promosi dan koleksi berbagai produk UMKM lokal, selain membantu pemasaran produk, juga menjadi sebagai media menarik minat Investor untuk melakukan penanaman modal di Aceh, meningkatkan produksi dan penjualan, dan berorientasi pada pasar global (ekspor), sehingga cara ini juga akan meningkatkan percaya diri para pelaku UMKM, merangsangnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, terciptanya lapangan pekerjaan baru dan terwujudnya implementasi undang-undang Cipta Kerja terhadap pemberdayaan, pembinaan, dan perlindungan UMKM di Indonesia, Lahirnya wirausaha baru dan wirausaha naik kelas

khususnya di Aceh.

4.5 Adanya Fasilitas yang Mudah Diakses Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan transformasi perpustakaan digital di Indonesia perlu adanya fasilitas yang memadai, sarana dan prasarana untuk mensupport pelayanan digital kesetiap pelosok daerah yang ada di Aceh. Prasarana tersebut meliputi, akses dan jaringan internet, platform yang cepat dan mudah beradaptasi dengan masyarakat dan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Hal ini pemerintah harus memulainya dari perdesaan atau gampong-gampong yang ada diseluruh provinsi aceh, selama ini keterbatasan jaringan internet menjadi suatu kendala masyarakat di beberapa daerah kabupaten tertentu yang ada di Aceh, baik daeran kepulauan maupun pegunungan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa hasil temuan dan pembahasan diatas, maka peran pustakawan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pelaku umkm dan percepatan transformasi perpustakaan digital di Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perpustakaan digital memberikan akses ke banyak konten dengan sumber daya dan pilihan yang berpotensi tak terbatas.
2. Perpustakaan digital membantu masyarakat ilmiah karena berfungsi sebagai reservoir untuk penyimpanan data, informasi, dan temuan penelitian penting. Untuk waktu yang sangat lama, catatan fisik studi dan penelitian ilmiah harus menghadapi masalah kritis (dihancurkan atau hilang).
3. Selama koneksi Internet tersedia, perpustakaan digital dapat diakses oleh siapa saja di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat teknologi sederhana, seperti PC, tablet, atau bahkan smartphone, tanpa adanya batasan fisik.
4. Meningkatkan literasi bagi masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan produk, promosi, pemasaran dan penjualan.
5. Adanya efesiensi waktu dan anggaran yang berharga bagi pemerintah, pustakawan dan pemustaka.
6. Peran pustakawan merupakan ujung tombak keberhasilan penerapan transformasi perpustakaan digital, dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pemerintah harus siap memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung mulai dari perdesaan hingga perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BI Perwakilan Aceh. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2022*. Bank Indonesia. Banda Aceh.
- Bahgia.S & Hasbi. (2020). *Pendampingan Permodalan Usaha Koperasi Nelayan Pintar Banda Aceh*. Jurnal industri Kreatif dan Kewirausahaan, 3 (1), 23-29.
- Darmono. (2001). *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: GramediaWidasarana Indonesia.

- <https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=en&id=8012> diakses pada tanggal 6 Juni 2022. <https://arpus.acehprov.go.id/?p=2941> (Arsip dan Perpustakaan Aceh) diakses pada tanggal 7 Juni 2022.
- https://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/11/1027629/aceh-masuk-10-besar-tertinggi-literasi_digital/ diakses pada tanggal 7 Juni 2022.
- <https://aceh.bps.go.id/indicator/52/204/1/pertumbuhan-ekonomi.html> Access Time: June 9, 2022, 8:35 pm.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6619.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 *Tentang Perpustakaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Status Literasi Digital Indonesia 2021*. Kemenkominfo. Jakarta.